

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**
(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2009-2011)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

SUYOKO
B 200 090 307

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SURAKARTA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).”

Yang ditulis oleh:

Nama : SUYOKO

NIM : B 200 090 307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Penandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima.

Surakarta, Februari 2013

Pembimbing Utama



(Drs. Suyatmin. M.Si.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(DR. Triyono, S.E., M.Si.)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasi anggaran belanja modal.

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 105 Laporan Realisasi APBD serta PDRB per Kapita di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Sedangkan PAD dan DAU berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Penelitian Adi (2006) kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hansen dan Mowen (2009: 1) anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang sangat erat. Perencanaan adalah melihat ke masa depan menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengendalian adalah melihat masa lalu, melihat apa yang senyatanya terjadi dan

membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

Menurut Hansen dan Mowen (2009: 1) menyatakan bahwa sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi masa depan. Organisasi dapat menerjemahkan strategi umum ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan-tujuan ini membentuk dasar anggaran. Suatu hubungan yang erat seharusnya terdapat di antara anggaran dan rencana strategis. Hubungan ini membantu manajemen untuk memastikan semua perhatian tidak terfokus pada jangka pendek. Hal ini penting karena sebagai rencana satu periode anggaran memiliki sifat untuk jangka pendek.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan Pemerintah daerah (Pemda). Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian Darwanto dan Yustikasari

(2007) DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* atau teori agensi yang mana Pemda sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada Pemda menjadi relevan dan penting. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Halim (2007: 1) dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemda, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemda harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah Pemda juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Penelitian Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemda terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini.

Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan Pemda diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting Pemda maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pentingnya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, dan Dana alokasi umum terhadap Pengalokasian anggaran belanja modal yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam mengembangkan ketiga potensi pendapatan daerah tersebut sebagai aset dan sumber dana alokasi anggaran belanja modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
2. Apakah terdapat pengaruh (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah terdapat pengaruh (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan akademisi dapat menambah wawasan tentang teori dan sebagai referensi data penelitian sejenis.
2. Memberi kontribusi teori sebagai bahan referensi dan dokumentasi maupun data tambahan bagi mahasiswa ataupun peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini

E. Tinjauan Pustaka

1. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah

Belanja daerah ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut departemen keuangan definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Hasil penelitian yang dilakukan Putro (2010) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemda. Untuk menambah aset tetap, Pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Arsyad (1999) dalam Hamzah dkk. (2007) mengemukakan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut penelitian Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

PDRB yang dipublikasikan ada 3 macam yaitu: (1) PDRB per kapita, (2) PDRB atas dasar harga konstan 2000, tanpa migas, dan (3) PDRB atas dasar harga berlaku, tanpa migas. Dari 3 macam PDRB tersebut, penelitian ini memilih PDRB per kapita sebagai variabel untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi karena PDRB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran/kesejahteraan rakyat di suatu daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di dalam penjelasan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan PAD sebagai variabel penelitian karena hasil pendapatan yang diperoleh Pemda dalam bentuk PAD bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan publik.

Menurut Mardiasmo (2002: 132) PAD merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari sini dapat ditarik simpulan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari Pemda dalam memanfaatkan PAD.

Penelitian Rahmawati (2010) mendefinisikan DAU sebagai dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang ada. Pemilihan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai obyek penelitian karena hakekatnya sistem yang berlaku secara nasional, maka sudah cukup mewakili.

2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010: 61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik suatu simpulan. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 62). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah x 3 tahun = 105 total anggar

G. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov – Smirnov. Dari hasil pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal.

b. Uji Multikolinearitas.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode enter yaitu dengan melihat pada *Tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji Multikolinearitas dapat ditunjukkan dengan nilai *varian inflation factor* (VIF) dan *tolerance value* dari tiap-tiap variabel independen. Suatu model regresi menunjukkan gejala Multikolinearitas jika nilai *VIF* di atas 10 sedangkan *tolerance value* di bawah 0,10.

Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Autokorelasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui bahwa angka DW dibawah -2 yang berarti ada autokorelasi positif, Angka DW diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada autokorelasi dan angka DW diatas +2 yang berarti ada autokorelasi negatif. Dari tabel IV.6 tersebut diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada bagian *model summary* diperoleh angka Durbin-Watson sebesar 1,593 yang terletak di antara -2 sampai +2, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Hasil analisis regresi linear berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (PRDB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 17 didapatkan persamaan regresi:

$$BM = 17353,293 + 0,000PDRB + 0,592PAD + 0,087DAU$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- 1) 17353,293 adalah konstanta yang artinya, apabila variabel PDRB, PAD dan DAU maka variabel belanja modal meningkat sebesar 17353,293.
- 2) $X_1 = 0,000$ adalah koefisien variabel X_1 yang artinya, jika variabel PDRB sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan sebesar 0,000.

- 3) $X_2 = 0,592$ adalah koefisien variabel X_1 yang artinya, jika variabel PAD sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan sebesar 0,592.
- 4) $X_3 = 0,087$ adalah koefisien variabel X_1 yang artinya, jika variabel DAU sebesar satu satuan, maka variabel belanja modal mengalami peningkatan sebesar 0,087.

b. Uji F

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi dengan variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh secara statistik. Hasil uji F didapatkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $28,015 > 2,84$ dan nilai signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti Hipotesis ditolak, sehingga variabel PDRB, PAD dan DAU berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal.

c. Uji R^2

Analisis uji R^2 diketahui bahwa untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,438. Hal ini berarti bahwa 43,8% variasi variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, PAD dan DAU, sedangkan sisanya yaitu 56,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

d. Uji t

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel berikut:

Variabel PDRB diketahui nilai t_{hitung} (0,536) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,593 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_1 diterima, artinya PRDB tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel PAD diketahui nilai t_{hitung} (5,168) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$.

Oleh karena itu, H_2 ditolak, artinya variabel PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

Variabel DAU diketahui nilai t_{hitung} (2,572) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,012 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 ditolak, artinya variabel DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal.

H. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis terhadap pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai $t_{hitung} = (0,536)$ lebih kecil daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,593 > \alpha = 0,05$. Artinya hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah diterima, yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Artinya pengeluaran Pemda akan disesuaikan dengan perubahan dalam naik turunnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut penelitian Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB.

Otonomi daerah mendorong Pemda untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama.

2. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis terhadap PAD memperoleh nilai $t_{hitung} = (5,168)$ lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Artinya hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa

PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah ditolak, yang berarti PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Harianto dan Adi (2007) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Anggaran belanja modal adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektoral (sektor/sub sektor). Belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum, dan sebagainya. Belanja pembangunan non fisik di antaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan keamanan masyarakat. Peningkatan PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal, tergantung dengan situasi dan kondisi tiap-tiap daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

3. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Hasil pengujian hipotesis terhadap DAU memperoleh nilai $t_{hitung} = (2,572)$ lebih besar daripada $t_{tabel} (2,000)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,012 < \alpha = 0,05$. Artinya hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah ditolak, yang berarti DAU berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Artinya pengeluaran Pemda akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan transfer dana dari pemerintah pusat untuk Pemda. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Putro (2010), Darwanto dan Yustikasari (2007).

DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Artinya kebijakan penggunaan DAU tersebut diserahkan kepada Pemda. Dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

I. Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel PDRB nilai t_{hitung} (0,536) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,000) sehingga H_1 diterima dan variabel PDRB tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Harianto dan Adi (2007) yang membuktikan bahwa PDRB berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.
2. Variabel PAD memiliki nilai t_{hitung} (5,168) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) sehingga H_2 ditolak dan variabel PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Harianto dan Adi (2007) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.
3. Variabel DAU memiliki nilai t_{hitung} (2,572) lebih besar daripada t_{tabel} (2,000) sehingga H_3 ditolak dan variabel DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Harianto dan Adi (2007) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

J. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas pada wilayah penelitian yaitu wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Keterbatasan dalam pengambilan sampel penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah x 3 tahun = 105 total anggaran.

K. Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian mendatang sebaiknya wilayah penelitian perlu diperluas lagi, yaitu tidak terbatas di wilayah propinsi Jawa Tengah, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.
2. Bagi penelitian mendatang sebaiknya menambah variabel penelitian tidak hanya variabel PDRB, PAD dan DAU dalam mempengaruhi belanja modal, sehingga kemampuan mengukurnya akan lebih baik.

L. Daftar Pustaka

- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- David Harianto dan Prio Hari Adi, 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*, Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 juli 2007.
- Ghozalli, I., 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta.
- Hansen, Don. R. dan Maryanne M. Mowen, 2009. *Akuntansi Manajerial*. Edisi 8: Salemba Empat, Jakarta.
- Husein Umar, 2003. *Metode Riset "Akuntansi Terapan"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mutahara, Rizqi, 2010. *Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007-2009)*. Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priyo Hari Adi, 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.
- Putro, Nugroho Suratno, 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi kasus Pada Kabupaten/Kota di Proponsi Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Rahmawati, Nur Indah, 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi, 2007. *Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran*. The 1st Accounting Conference. Jakarta.

Singgih Santoso, 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono, 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Yamin, S., Rachmach, L. A. & Kurniawan, H., 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*, Jakarta: Salemba Empat.

www.djpk.depkeu.go.id

www.jateng.bps.go.id